

## Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024

Oleh :

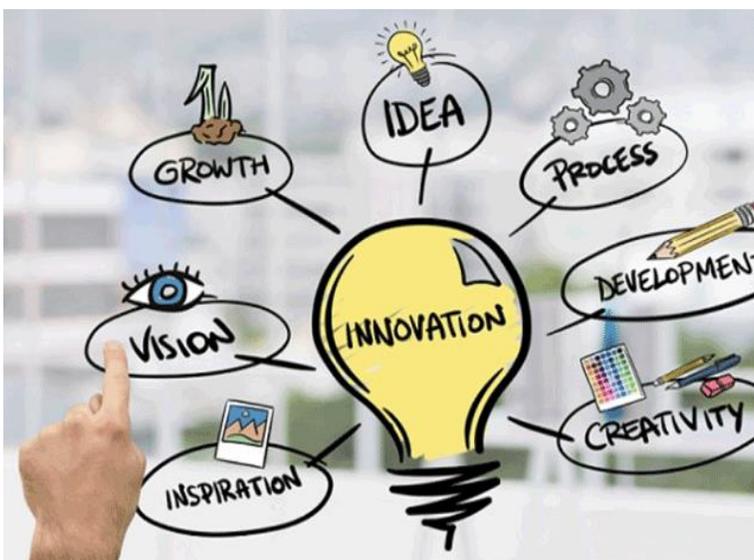
H. Muhammad Afif Bizri, SH, M. Hum, Hairul Ikhwan, S. Hut.  
Hj. Rusmaliah, S. Hut. Yunita Anggeriana, S. Hut.

### PENDAHULUAN

Secara legal formal Inovasi Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah. Pengaturan ini pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kearifan lokal yang pada gilirannya dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan besar Inovasi Daerah yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah.

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Indeks ini ada beberapa indikator yang sangat menentukan Indikator Satuan Pemda (ISP) terdiri dari 16 indikator dan Indikator Satuan Inovasi (ISI) sebanyak 20 indikator. Indeks Inovasi Daerah dapat menggambarkan beberapa kondisi, seperti : Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan Teknologi, dan Hasil Kreatif.



### Ringkasan

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Indeks ini ada beberapa indikator yang sangat menentukan Indikator Satuan Pemda (ISP) terdiri dari 16 indikator dan Indikator Satuan Inovasi (ISI) sebanyak 20 indikator.

Pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan sebanyak 137 inovasi. Selanjutnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk dalam tahapan Presentasi dan Wawancara pada ajang *Innovative Government Award 2024* yang mana selaras dengan hasil Indeks Inovasi Daerah.

Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan meraih nilai indeks sebesar 73,15 dan masuk dalam Kategori Sangat Inovatif.

Walaupun secara nilai indeks meningkat setiap tahunnya, namun secara laju dan peringkat Nasional terjadi penurunan.

Dalam rangka perbaikan Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran kebijakan yang dapat diambil kedepan:

- Membangun komitmen bersama untuk melakukan kerja secara terpadu dalam peningkatan inovasi di daerah.
- Melakukan rancangan inovasi selaras dengan perencanaan daerah/Perangkat Daerah,
- Melakukan penajaman hasil / dampak inovasi
- Mendorong peningkatan ekosistem dan budaya inovasi pemerintah daerah
- Memberikan apresiasi dan reward bagi ASN yang melakukan inovasi.
- Mengoptimalkan pelaksanaan HSS Innovation Awards sebagai ajang motivasi dalam pengembangan inovasi.
- Melakukan persiapan data dan eviden inovasi lebih awal (diawal tahun)
- Mendorong keberlanjutan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.
- Menjadikan inovasi sebagai budaya .
- Membangun inovasi berbasis tematik.

Proses pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Sistem Innovative Government Award – IGA di Kemendagri dalam setiap tahunnya terus melakukan perubahan dan perbaikan. Kalau pada tahun sebelumnya lebih kearah kuantitas namun pada Tahun 2021 dan 2022 mulai berimbang kearah kualitas. Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya.

**TINJAUAN KEBIJAKAN**

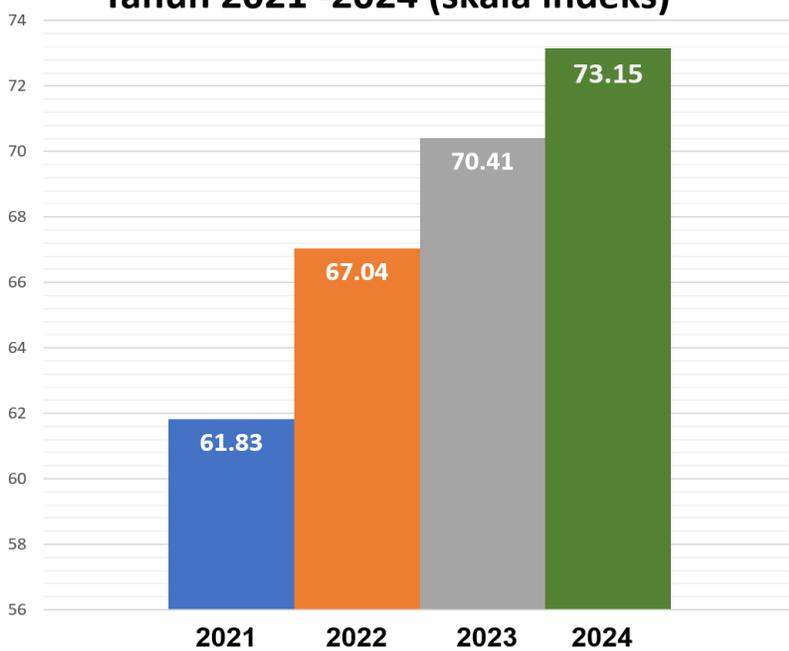
Pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan sebanyak 137 inovasi. Selanjutnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk dalam tahapan Presentasi dan Wawancara pada ajang *Innovative Government Award 2024* yang mana selaras dengan hasil Indeks Inovasi Daerah.

Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan meraih nilai indeks sebesar 73,15 dan masuk dalam Kategori Sangat Inovatif. Kalau dibandingkan dengan nilai indeks sejak tahun 2021 (karena dibawah 2021 nilai indeks masih belum nilai komposit) maka nilai indeks inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan nilai.

Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat nilai indeks sebesar 73,15 dengan ini terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 2,74 kalau dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan pada 2023, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks sebesar 70,41 (Kategori Sangat Inovatif), dengan ini terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 3,37 kalau dibandingkan tahun 2022. Adapun di Tahun 2022 nilai indeks sebesar 67,04 yang meningkat sebesar 5,21 dari tahun 2021 yang nilai indeks sebesar 61,83.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai indeks Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus naik setiap tahunnya, walaupun secara laju pertumbuhan setiap tahunnya terjadi penurunan.

**Indeks Inovasi Daerah (IID), Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 -2024 (skala indeks)**



Berdasarkan hasil pengukuran Indeks inovasi Daerah Tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks sebesar 73,15 (Kategori Sangat inovatif), dengan ini terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 2,74 kalau dibandingkan dengan tahun 2023

Tahun 2023, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks sebesar 70,41 (Kategori Sangat Inovatif), dengan ini terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 3,37 kalau dibandingkan tahun 2022.

Gambaran secara utuh, sejak pertama kali Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti pengukuran Indeks Inovasi Daerah di Tahun 2019 serta data nilai indeks kabupaten, peringkat nasional, serta kategorinya, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Terlihat bahwa secara peringkat nilai indeks secara nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2021 terjadi penurunan.

Pada tahun 2019 Hulu Sungai Selatan masuk 18 Nasional, 2020 naik ke peringkat 8 Nasional. Lalu sejak 2021 terjadi penurunan peringkat, dimana 2021 di 11 Nasional, 2022 di 12 Nasional, 2023 di 14 Nasional dan 2024 di 22 Nasional .

**Pada tahun 2019 dan 2020 pengukuran nilai indeks masih terjadi perubahan. Sejak tahun 2021 baru sudah mapan dalam pengukuran.**

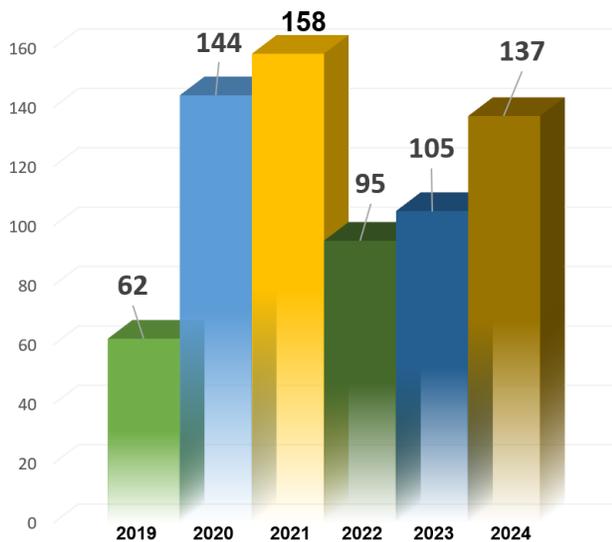
**Sejak tahun 2021 -2024 nilai indeks terus terjadi peningkatan, walaupun di sisi peringkat nasional terjadi kemunduran, dengan semakin ketatnya perkembangan daerah lain**



Secara jumlah inovasi yang dilaporkan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami Fluktuasi. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kebijakan Kemendagri yang focus pada kualitas inovasi (data dukung) yang tersedia, sehingga kuantitas inovasi tidak terlalu berdampak ke nilai indeks, atau perubahan kebijakan dengan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas inovasi.

Pada pengukuran nilai indeks inovasi daerah tahun 2019 Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan 62 Inovasi, di tahun 2022 sebanyak 144 inovasi, tahun 2021 melaporkan sebanyak 158 inovasi, selanjutnya di tahun 2022 melaporkan sebanyak 95 inovasi, tahun 2023 sebanyak 105 inovasi dan pada tahun 2024 melaporkan data inovasi sebanyak 137 inovasi.

### Jumlah Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 -2024 pada IGA Kemendagri



**Fluktuasi jumlah inovasi yang dilaporkan setiap tahunnya banyak dipengaruhi oleh kualitas inovasi (data dukung) yang tersedia.**

**Serta kebijakan dari Kemendagri yang melakukan perubahan pola penghitungan nilai indeks yang mulai mengarah ke arah kualitas dan kuantitas secara berimbang**

Dalam rangka perbaikan Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran kebijakan yang dapat diambil kedepan:

- a) Membangun komitmen bersama mulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Inovator di seluruh Kabupaten untuk melakukan kerja secara terpadu dalam peningkatan inovasi di daerah.
- b) Melakukan rancangan inovasi selaras dengan perencanaan daerah/Perangkat Daerah, sehingga setiap inovasi masuk dalam dokumen perencanaan serta memiliki anggaran.
- c) Melakukan penajaman hasil / dampak inovasi yang terkait langsung dengan indikator utama pembangunan, sehingga sesuai atau selaras dengan Cascading Kabupaten / Organisasi Perangkat Daerah, yang akan otomatis selars dengan perencanaan daerah.
- d) Mendorong peningkatan ekosistem dan budaya inovasi pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan digencarkannya ide-ide inovasi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan *mindset* inovatif.
- e) Memberikan apresiasi dan reward bagi ASN yang melakukan inovasi.
- f) Mengoptimalkan pelaksanaan HSS Innovation Awards sebagai ajang motivasi dalam pengembangan inovasi.
- g) Melakukan persiapan data dan eviden inovasi lebih awal (diawal tahun), hal ini dikarenakan nilai indeks inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh nilai kematangan perinovasi, dan hal ini memerlukan waktu yang cukup.
- h) Meningkatkan sosialisasi HSS Innovation Awards sehingga partisipasi dan kualitas inovasi lebih baik.
- i) Mendorong keberlanjutan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.
- j) Menjadikan inovasi sebagai budaya yang selalu digaungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena inovasi bukanlah sebuah urusan, tapi ada di setiap urusan pemerintahan, di setiap program bahkan di setiap kegiatan.
- k) Akselerasi inovasi-inovasi pada OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat, dan sosial.
- l) Membangun inovasi berbasis tematik pembangunan.